

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
(Suatu Studi Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Oleh  
Christo Imanuel Londok**

***ABSTRACT:** This research questioned the two main problems, namely: the extent to which successful implementation of disaster management policies, and Is successful implementation of disaster management policies in Southeast Minahasa district also determined or influenced by factors of communication, resources, implementing dispositions or attitudes and bureaucratic structures. Thereby, this study aims to: (1) to describe the successful implementation of disaster management in Southeast Minahasa district, (2) to determine whether the successful implementation of disaster management policies in Southeast Minahasa district also determined or influenced by factors of communication, resources, disposition or implementing attitude and bureaucratic structures.*

*This research uses a quantitative approach to the application of descriptive and explanatory methods. The data and information collected through questionnaires distributed technique to 60 respondents, and is equipped with observation and documentation techniques, and then analyzed by applying a multiple linear regression analysis techniques.*

*Based on the analysis of data, it is known that: (1). The success rate of implementation of disaster management in Southeast Minahasa district are in the category of "moderate/middle" or quite successful. This fact shows that the implementation of policies combating disaster in this area is not optimal . It is constrained by inadequate availability of resources, particularly the amount and quality of human resources involved in disaster management policy itself. (2). Together or simultaneous communication factors, resources, dispositions or attitudes and bureaucratic structures implementing disaster management policies significantly influence the success implemntasi disaster, but partial, there are two factors that low influence, namely: communication factors and bureaucratic structures, where the influence of both these factors were not significant.*

*Thereby, it can be concluded that the factor of communication and bureaucratic structures should get priority attention for future improvements to optimize performance / success of the implementation of disaster management policies, particularly in Southeast Minahasa regency.*

*Key words : policy implementation, disaster prevention*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejarah mencatat banyaknya jumlah kejadian bencana alam di dunia menimbulkan dampak kerugian yang

sangat besar terhadap manusia dan asset penghidupannya. Hal ini memberikan pembelajaran untuk merubah pola pikir masyarakat dunia akan arti pentingnya menanggulangi bencana sebelum

bencana itu terjadi atau yang saat ini disebut dengan pengurangan risiko bencana (PRB). Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanggulangan bencana terus berlangsung dan berubah menuju arah yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Penanggulangan bencana semakin mendapat perhatian yang sangat serius dari pemerintah daerah di Indonesia. Ini terbukti dengan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 33 provinsi serta 497 BPBD di tingkat kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada Pasal 18 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib untuk membentuk BPBD di wilayahnya. Namun harus diakui bahwa dengan dibentuknya BPBD, tidak serta merta menjadikan penanggulangan bencana dinilai handal. Peningkatan kapasitas baik pengetahuan dan keterampilan terkait kebencanaan masih harus terus dilakukan.

Disadari bahwa kecenderungan kejadian bencana di Indonesia setiap tahun terus meningkat. Pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat lokal/daerah yang dekat dengan potensi bencana

sangat penting. Pemerintah daerah yang belum mengenal betul mengenai sistem penanggulangan bencana sangat mengharapkan pendampingan dari BNPB. Namun tidak menutup kemungkinan, pemerintah daerah lain di sekitarnya dapat juga memberikan dukungan, baik itu pemikiran, personel, maupun logistik dan peralatan. Sementara itu dukungan dari pusat, khususnya BNPB, merupakan wujud konkret komitmen dalam penanggulangan bencana di Indonesia serta pencapaian visi “Menuju Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana”.

Kondisi Provinsi Sulawesi Utara termasuk wilayah rawan bencana baik secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis, adanya pertemuan beberapa lempeng tektonik bumi, dikelilingi beberapa gunung berapi, daerah kepulauan, degradasi lingkungan yang tinggi dan penduduk yang berlatar belakang dari banyak suku dan etnis. Hampir sebagian besar potensi ancaman bencana berada di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya seperti tsunami, banjir, tanah longsor/gerakan tanah, gunung api, gelombang pasang air laut, kebakaran, konflik sosial dan teror.

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai bagian dari wilayah provinsi

Sulawesi Utara dan merupakan lokasi penelitian ini, sejak tahun 2009 telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, kemudian diubah dengan PERDA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini dilengkapi dengan beberapa kebijakan operasional yang mencerminkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai peristiwa bencana alam yang merugikan masyarakat, baik jiwa maupun harta benda.

Berbagai program penanggulangan bencana telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD, baik pada tahap mitigasi bencana, tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan tahap rekonstruksi serta rehabilitasi.

Namun demikian masih ada keluhan dari masyarakat sebagai korban bencana, terutama implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum maksimal dilakukan. Masih menyisahkan berbagai permasalahan yang belum

dipulihkan, baik fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Disain Penelitian**

Mengacu pada tujuan penelitian yakni untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, faktor-faktor penentu (komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana dan struktur birokrasi) terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana dan besarnya kontribusi faktor-faktor tersebut terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara, maka penelitian ini menggunakan disain kuantitatif dengan penerapan metode penelitian deskriptif dan eksplanasi.

### **B. Variabel Penelitian dan Rumusan Operasional**

Penelitian ini melibatkan dua variabel pokok, yaitu 1). Keberhasilan Implementasikan kebijakan penanggulangan bencana sebagai variabel terikat atau variabel tergantung (*dependent variable*) yang diberi simbol Y; 2). Faktor-faktor yang diduga turut menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan penanggulangan bencana, seperti : faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang diberi simbol X.

Untuk dapat melakukan pengukuran kedua variabel, maka terlebih dahulu perlu didefinisikan secara konseptual variabel-variabel tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Singarimbun dan Effendi (1989:34) bahwa konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara konseptual maupun operasional beberapa konsep/variabel yang digunakan berkaitan dengan fokus penelitian tentang implementasi kebijakan penanggualangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai berikut :

1. Keberhasilan atau kinerja implementasi kebijakan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai suatu tingkat prestasi atau hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam mengantisipasi dan menanggulangi peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana adalah faktor-faktor yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan atau kinerja penanggulangan bencana dalam proses implementasinya. Menurut Edward III (1984 : 9) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor, yaitu :
  - a. Komunikasi; dimaksudkan kebijakan penanggulangan bencana yang harus diimplementasikan disalurkan melalui orang-orang yang tepat dan

komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Kejelasan komunikasi menghendaki agar kebijakan penanggulangan bencana yang ditransformasikan kepada implementor, target group (kelompok sasaran) dan pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan penanggulangan bencana yang dibuat.

- b. *Resources* atau sumberdaya, dimaksudkan bahwa kejelasan, konsistensi dan akurasi komunikasi tidak akan mempengaruhi implementasi kebijakan, jika sumber daya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya material, financial dan kewenangan. Tanpa sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif.
- c. Disposisi atau sikap, dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh keinginan atau tekad para pelaksana dalam menerapkan

kebijakan atau yang biasa kita sebut sebagai motivasi.

- d. Struktur birokrasi (organisasi pelaksana kebijakan) dimaksudkan adalah Implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dan kerjasama dari masing-masing pihak menjadi lebih penting. Dalam hubungan ini, setiap pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu *standard operation procedure* (SOP) yang disepakati bersama.

### **C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua karakteristik yang berhubungan dengan implementasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara dan faktor-faktor penentunya.

Adapun besar sampel ditetapkan secara purposive, baik dari unsur pelaksana kebijakan (implementor) maupun dari unsur masyarakat, baik sebagai anggota LSM, maupun sebagai korban bencana. Dari unsur pelaksana kebijakan ditetapkan sebanyak 30 orang yang tersebar di empat instansi, masing-masing BPBD, Dinas PU, Dinas Tenaga Kerja, Transmisgrasi dan Sosial serta Dinas Kesehatan, kemudian dari unsur masyarakat sebanyak 30 orang.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris survey dengan pendekatan kuantitatif, maka instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner atau daftar pertanyaan (angket) dan dibantu dengan *interview-guide* (pedoman wawancara). Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk menjaring data primer, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian dokumentasi. Semua data dikumpulkan dengan metode survei dan observasi langsung.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis statistik sederhana, seperti analisis tabel frekuensi (persentase), analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Teknik-teknik analisis yang digunakan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi/mendesripsikan keadaan variabel-variabel penelitian, maka digunakan teknik analisis Tabel Frekuensi atau analisis persentase.
2. Untuk menguji keeratan hubungan (derajat korelasi) digunakan teknik analisis korelasi *product momemnt*,

dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini :

- a. Menghitung nilai koefisien korelasi dengan mengoperasikan rumus r-pearson yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983) :

$$R = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

- b. Melakukan uji signifikansi (uji hipotesis) dengan cara mengkonsultasikan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$  pada taraf uji 1 % dengan derajat kebebasan (dk) = n.
3. Apabila hasil uji ternyata signifikan, menurut Sugiyono (2009) perlu dilanjutkan dengan analisis regresi linear sederhana guna mengetahui bentuk pola hubungan fungsional antara kedua variabel, dengan menyelesaikan persamaan regresi linear sederhana  $\hat{Y} = a + bX$  (Sudjana, 1983), menempuh prosedur analisis sebagai berikut:

- a. Menghitung koefisien konstanta a dan koefisien arah regresi b melalui penyelesaian rumus :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

- b. Menguji keberartian koefisien regresi (uji independent) dan uji linearitas regresi dengan

menggunakan analisis of variance (ANOVA).

4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi atau daya penentu/pengaruh beberapa faktor (X) terhadap keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan penanggulangan bencana (Y) digunakan perhitungan determinasi dengan cara mengkwadratkan nilai koefisien korelasi, yaitu  $(r)^2$ .
5. Semua analisis dibantu dengan perangkat computer melalui program SPSS for windows versi 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Keberhasilan/Kinerja Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

Mengacu pada indikator variabel , selanjutnya disusun daftar pertanyaan penelitian atau kuesioner sebanyak 6 butir pertanyaan kemudian didistribusikan kepada 60 responden. Setiap butir pertanyaan/ Pernyataan disediakan 5 (lima) opsi/pilihan jawaban untuk dipilih responden.

Data menunjukkan bahwa sebaran skor variabel Keberhasilan/Kinerja Penanggulangan Bencana ( $X_1$ ) berada pada kelas interval antara 17 – 20 dengan frekuensi

sebanyak 28 responden atau  $\pm 46,7\%$ . Artinya bahwa variabel Keberhasilan/Kinerja Penanggulangan Bencana menurut responden bervariasi antara rendah ke sedang atau menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata skor variabel Keberhasilan/Kinerja Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dikatakan cukup berhasil, sebagaimana dapat dilihat skor rata-rata capaian Keberhasilan/Kinerja Penanggulangan Bencana sebesar 21,35 atau 71,2 %.

#### 2. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana

##### a. Komunikasi

Data menunjukkan bahwa variabel Komunikasi, baik antara pembuat kebijakan dengan implementor, antar implementor maupun antara implementor kebijakan dengan kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat penerima dampak bencana, khususnya di Kabupaten Mitra, menurut responden berada pada kategori “sedang” atau “cukup efektif”.

##### b. Sumberdaya

Distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa sebaran skor variabel sumber daya untuk implementasi ( $X_2$ ) berada pada kelas interval 19 – 23 dengan jumlah

frekuensi sebanyak 37 responden atau sekitar 61,7% dari 60 responden yang diwawancarai. Realitas hasil analisis ini mengindikasikan bahwa rata-rata skor variabel sumber daya untuk implementasi masih berada pada kategori “sedang” atau dapat dikatakan “cukup”.

c. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Distribusi jawaban responden mengindikasikan bahwa sebaran skor variabel Disposisi atau sikap pelaksana berada pada kelas interval 16 - 20 dengan jumlah frekuensi sebanyak 26 responden atau 43,3%. Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rata-rata skor variabel disposisi atau sikap pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara masih berada pada kategori “rendah” cenderung “sedang”.

d. Struktur Birokrasi Pelaksana

Distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa sebaran skor variabel struktur birokrasi pelaksana kebijakan penanggulangan bencana berada pada kelas interval 21 - 25 dengan jumlah frekuensi sebanyak 36 responden atau 60%. Realitas hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa rata-rata skor variabel struktur organisasi pelaksana kebijakan

penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori “sedang” atau cukup fleksibel.

## B. Pengujian Hipotesis

hasil analisis regresi linear berganda dari variabel-variabel yang diteliti, variabel independen yang terdiri dari : variabel komunikasi ( $X_1$ ), variabel sumber daya ( $X_2$ ), variabel disposisi ( $X_3$ ) dan variabel struktur birokrasi ( $X_4$ ); serta variabel keberhasilan implementasi ( $Y$ ) sebagai dependen variable.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa, lewat analisis ragam satu arah (ANOVA) mengindikasikan bahwa regresi secara statistik sangat signifikan dengan nilai  $F = 4,269$  untuk derajat kebebasan  $k = 4$  dan  $n-k-1 = 60 - 4 - 1 = 55$ , dan nilai  $P$  ( $P$ -value) = 0,000 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ .

Persamaan garis regresi linear berganda untuk metode kuadrat terkecil (*least squares method*) yang didapat ialah :

$$\hat{Y} = 3,425 + 0,182X_1 + 0,403X_2 + 0,338X_3 - 0,036X_4$$

Penjelasan terhadap persamaan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

a.  $\hat{Y}$  = Keberhasilan implementasi yang diduga;  $X_1$  = Komunikasi;  $X_2$  =

Sumber daya;  $X_3$  = Disposisi/Sikap; dan  $X_4$  = Struktur birokrasi.

- b. Nilai  $\alpha$  konstanta sebesar 3,425 di mana nilai itu mempunyai arti bahwa jika variabel Komunikasi ( $X_1$ ), variabel Sumber daya ( $X_2$ ), variabel Disposisi atau sikap ( $X_3$ ), dan variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) tidak ada atau pada posisi 0 (nol), maka Keberhasilan implementasi penanggulangan bencana (Y) di Kabupaten Minahasa Tenggara sebesar 3.425.
- c. Koefisien regresi  $b_1$  sebesar 0,182 bermakna bahwa setiap penambahan atau peningkatan sebesar +1 dari faktor Komunikasi, akan meningkatkan Keberhasilan implementasi penanggulangan bencana sebesar 0,182 satuan per unit atau sebesar 18,2%.
- d. Koefisien regresi  $b_2$  sebesar 0,403 menyatakan bahwa setiap penambahan +1 satuan per unit Sumber daya, akan meningkatkan Keberhasilan implementasi sebesar 0,403 satuan perunit atau sebesar 40,3%.
- e. Koefisien regresi  $b_3$  sebesar 0,338 memberi makna bahwa setiap penambahan +1 satuan per unit Disposisi atau sikap, akan meningkatkan Keberhasilan

implementasi sebesar 0,338 atau 33,8%.

- f. Koefisien regresi  $b_4$  sebesar -0,036 memberi makna bahwa setiap penambahan +1 satuan per unit untuk Struktur birokrasi, akan menurunkan tingkat Keberhasilan implementasi sebesar 0,036 atau 3.6%.

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa nilai signifikansi F sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ), maka hipotesis yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen baik Komunikasi, Sumber daya, variabel Disposisi atau sikap maupun variabel Struktur birokrasi, secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan implementasi penanggulangan bencana, khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat diterima secara meyakinkan.

### C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda, dan uji F, ditemukan bahwa seluruh variabel independen yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel dependen (keberhasilan implemenmtasi penanggulangan bencana, khususnya di

Kabupaten Minahasa Tenggara. Hubungan antara keempat variabel tersebut secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi ( $r^2$ ) sebesar 0,713 atau 71,3%.

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat diterima dengan sangat meyakinkan dan teruji keberalakuannya secara empiris. Ini terlihat dari hasil uji F untuk keberhasilan implementasi penanggulangan bencana yang memberikan hasil F-tes sebesar 0,000 atau  $< 0,05$ . Hal ini mengindikasikan ada pengaruh yang signifikan dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi secara simultan terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Besarnya derajat determinasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi penanggulangan bencana,

secara bersama-sama ditentukan oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi sebesar 71,3 %, sedangkan sisanya sebesar 28.7 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji statistik ditemukan bahwa variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi berpengaruh secara simultan terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian ini membenarkan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1984), di mana implementasi kebijakan dapat dimulai dari kondisi abstrak dari sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurutnya ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat faktor tersebut, menurutnya harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang sangat erat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tingkat keberhasilan implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa Tenggara berada pada kategori “sedang” atau cukup berhasil. Fakta ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana di daerah ini belum optimal. Hal ini terkendala oleh belum memadainya ketersediaan sumber daya, terutama jumlah dan mutu sumber daya manusia pelaksana kebijakan penanggulangan bencana itu sendiri.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama atau simultan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi pelaksana kebijakan penanggulangan bencana berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi penanggulangan bencana, namun secara partial, ada dua faktor yang rendah pengaruhnya yaitu : faktor komunikasi dan struktur birokrasi, di

mana pengaruh kedua faktor ini tidak signifikan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Minahasa Tenggara, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana, maka pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara perlu melakukan penambahan pegawai, terutama tenaga profesional, khususnya dibidang mitigasi dan penanggulangan bencana pasca tanggap darurat.
2. Untuk maksud yang sama, disarankan agar BPBD perlu memperkuat dan mengefektifkan komunikasi dua arah serta koordinasi dengan instansi/dinas terkait dan stakeholders lainnya, seperti LSM, swasta dan pemerintah Kecamatan serta pemerintah desa, terutama desa-desa yang berada dalam zona rawan bencana. Disarankan juga agar BPBD lebih memaksimalkan lagi bidang-bidang dalam struktur organisasi yang masih kosong, dan diisi dengan tenaga-tenaga yang ahli dibidangnya

atau dapat juga saling berkoordinasi dengan dinas terkait dalam proses perekrutan pegawai dalam bidang-bidang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2007, Undang-undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Abdul Wahab, S, 2001, *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anderson, J.E., 1979, *Cases in Public Policy Making*, New York Preager Publishers.
- Bardach, Eugene, 1977, *The Implementation Game* : Massacchusetts, The Mit Press.
- Cheema and Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development (Policy Implementation In Developing Countries)*. SAGR Publication
- Dye, Th. R., 1992, *Understanding Public Policy (Seventh Edition)*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.
- Edward, G. C. III., 1984, *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Effendi, Sofian., 2001, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, MAP-UGM, Yogyakarta.
- Goggin, Malcom L, and O.M. Bowman, James P. Lester and Lawrence J.O. Toole, 1990, *Implementation Theory and Practice: Toward and Third Generation*, Scoot, Foresman and Company, Illinois.
- Grindle, Merilee S., 1980., *Politics and Policy Implementation in the Third World.*, New Jersey: Prnceton University Press
- Hoogerwerf, A, 1985, Ilmu Pemerintahan (alih bahasa oleh R.L.L. Tobing), PT.Erlangga, Jakarta.
- Islamy, Irfan. 1994, *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Jones, Ch. O., 1996, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rosdakarya.
- , 2005. *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta : Sirao Credentia Center
- Pressman J. L. dan A. Wildavsky., 1984., *Implementation.*, Berkeley: University of California Press
- Quade, E.S, 1984, *Analysis for Public Decisions*, Second Edition, New York: Elsevier Science Publishing Co, Inc.
- Ripley, Randall B. dan Grace A. Franklin 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chichago: The Dorsey Press
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Van Meter, Donalds, and C. E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework" in Administration and Society*, Beverly Hill, Sage Publication.